

**KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI
TERKAIT SIFAT PUTUSAN POSITIVE LEGISLATURE
DALAM UJI MATERIIL UNDANG UNDANG
TERHADAP UNDANG UNDANG DASAR**

SKRIPSI



Disusun oleh:

HENDRIK WIJAYA

201210110311069

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

2018

**KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI
TERKAIT SIFAT PUTUSAN POSITIVE LEGISLATURE
DALAM UJI MATERIIL UNDANG UNDANG
TERHADAP UNDANG UNDANG DASAR**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun oleh:
HENDRIK WIJAYA
201210110311069

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
2018**

**KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT SIFAT PUTUSAN
POSITIVE LEGISLATURE DALAM UJI MATERIIL UU TERHADAP UUD**

Diajukan Oleh:

HENDRIK WIJAYA

201210110311069

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Rabu 25 Juli 2018

Pembimbing Utama,


Catur Wido Haruni, SH., M.Si., M.Hum

Pembimbing Pendamping,


Dr. Sulardi, SH., M.Si.


Dekan,

Dr. Tongat, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,


Nu'man Aunuh, SH., M.Hum

SKRIPSI

Disusun oleh:

HENDRIK WIJAYA

201210110311069

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Rabu 25 Juli 2018

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

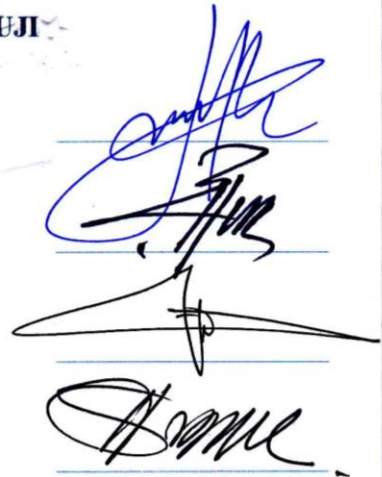
SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Catur Wido Haruni, SH. M.Si., M.Hum

Sekretaris : Dr. Sulardi, SH., M.Si.

Penguji I : Nu'man Aunuh, SH., M.Hum

Penguji II : Wasis, S.H., M.Si., M.Hum



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : **HENDRIK WIJAYA**

NIM : **201210110311069**

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa ;

SKRIPSI dengan judul :

**KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT SIFAT PUTUSAN
POSITIVE LEGISLATURE DALAM UJI MATERIIL UNDANG UNDANG
TERHADAP UNDANG UNDANG DASAR**

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTI NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 06 Agustus 2018

ang menyatakan,



Hendrik Wijaya

UNGKAPAN PRIBADI

*Demi Dzat yang jiwaku ditanganNya,
Semua yang ada dibumi pasti akan sirna,
kecuali Dzat Tuhanmu yang maha besar,
Tiada tuhan selain Allah, segala puji bagiMu.*

*Skripsi ini kupersembahkan untuk :
Ayahanda dan Ibundaku tercinta
Terima kasih atas dukungannya
Terima kasih atas bimbingannya
Terima kasih atas kesabarannya
& Terima kasih untuk doa yang selalu dipanjatkan untuk ananda*

Motto :

מג הז רובעי
(gam zeh yaavor)

“Dan inipun Akan Berlalu”

KATA PENGANTAR

Iqra (اقْرَأ), “bacalah” merupakan wahyu pertama yang Allah perintahkan kepada Muhammad. *Iqro’ bismi rabbikalladzii kholaq*, bacalah dengan menyebut nama Rabbmu yang menciptakan, *Alhamdulillah* segala puji bagi Allah, tiada tuhan selain Allah. Allah berfirman :

وَلَوْ أَنَّ فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ
اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan laut (menjadi tinta), ditambahkan kepadanya tujuh laut (lagi) sesudah (kering)nya, niscaya tidak akan habis-habisnya (dituliskan) kalimat Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (QS. Al- Luqman ayat 27)

Oleh karena begitu luasnya ilmu Allah, tak henti-hentinya penulis mengucapkan syukur. Karena atas limpahkan berkat, rahmat, serta hidayah ilmu yang begitu sedikit ini, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT SIFAT PUTUSAN POSITIVE LEGISLATURE DALAM UJI MATERIIL UNDANG UNDANG TERHADAP UNDANG UNDANG DASAR”**.

Penulisan ini merupakan salah satu syarat yang harus ditempuh dalam menyelesaikan jenjang pendidikan Strata Satu (S-1) Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan lancar tanpa adanya dukungan dan dorongan motivasi dari berbagai pihak selama proses studi, terlebih dalam proses penyelesaian skripsi ini, Oleh karena itu penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada :

1. Kedua orang tuaku, khususnya Ibunda Agus Sri Ismianti serta Ayahanda Mulyadi. Dan Kedua srikandi, kakakku Erna Wijayanti dan Adikku Alivia Mujaya.
2. Almater Universitas Muhammadiyah Malang.
3. Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Malang, yakni Bapak Drs. H. Fauzan, M.Pd

4. Bapak Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, yakni Dr. Tongat, S.H., M.Hum
5. Ibu Catur Wido Haruni, S.H., M.Si., M.Hum selaku Dosen Pembimbing Pertama, dan bapak Dr. Sulardi, S.H., M.Si selaku Dosen Pembimbing Kedua, atas waktu, kesabaran serta saran-sarannya dalam menyusun skripsi ini.
6. Dosen Wali Kelas B Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang angkatan Tahun 2012 Ibu Cekli Setya Pratiwi, S.H., LL.M
7. Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang
8. Semua teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang khususnya kelas B angkatan 2012, teman-teman HMI Cabang Malang (Himpunan Mahasiswa Islam) Komisariat Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, teman-teman LSO PUKASH (Pusat Kajian Keilmuan dan Keislaman) Universitas Muhammadiyah Malang, teman-teman BEM-FA FH UMM (Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang periode 2013-2014 dan 2014-2015)
9. Serta sahabat-sahabat tercinta khususnya group “*freternite*” dan “tentang kawan”.

Demikian dari saya, dengan mengucapkan *Bismillahirrohmanirrohim*, semoga skripsi ini bermanfaat bagi negriku Indonesia dan pengembangan ilmu pengetahuan. Ya Allah, jadikanlah saya orang yang baik & benar, yang mulia di sisi-MU, berguna bagi agama-Mu, dan mulia di kehidupan berbangsa dan bernegara. *Aamiin Ya Robbal'alam*. Terima kasih

Malang,

Hendrik Wijaya

DAFTAR ISI

COVER DALAM	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN PENULISAN HUKUM BUKAN PLAGIAT.....	iv
UNGKAPAN PRIBADI.....	v
ABSTRAKSI.....	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Kegunaan Penelitian.....	10
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Penelitian	13
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Tinjauan Umum Tentang Negara Hukum Dan Konstitusi.....	15
B. Tinjauan Umum Tentang Kewenangan Dan Mahkamah konstitusi	35
C. Tinjauan Umum Tentang <i>Positive Legislature</i>	51
BAB III : PEMBAHASAN	54
A. Kedudukan Norma Baru (<i>Positive Legislature</i>) Yang Diciptakan Mahkamah Konstitusi Ditinjau Dari Mekanisme <i>Checks And Balance</i> ...	54
B. Wewenang Dan Kekuatan Mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Menciptakan Norma Baru (<i>Positive Legislature</i>)	67

BAB IV : PENUTUP	75
A. Kesimpulan.....	75
B. Saran.....	76
 DAFTAR PUSATAKA	78
GLOSSARY.....	83
INDEKS	84



DAFTAR PUSATAKA

BUKU

- A.Gunawan Setiardja, 2001, *Dialektika Hukum dan Moral dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia*, cet. V, Yogyakarta, Kanisius
- Asshiddiqie Jimly, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK Republik Indonesia, Jakarta
-, 2010, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta Timur. Sinar Grafika
-, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi*, Jakarta PT. Bhuana Ilmu Populer
- Alex Tuckness, 2002, *Locke and The Legislative Point of View: Toleration, Contested Principles and The Law*, New Jersey, Princeton University Press
- A.V. Dicey, 1959, *An Introduction to Study of Law of the Constitusi*, London, Mac. Milan & Co
- Azhary, 2003, *Negara Hukum (Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya, Dilihat dari Masa Kini)*, Jakarta, Penerbit Kencana
- Bryan A. Garner, 1999, *Black's Law Dictionary*, St Paul Minn, United States of America, West Publishing Co
- Carl J.Friederich, 1973, *Constitutional Government and Democracy: Theory and Practice in Europe and America*. Wieldham, Mass, Bleisdell Publishing Company.
-, 1963, *Man and His Government*, New York, Mac graw-Hill Co
- Dahlan Thaib, 2000, *Kedaulatan Rakyat. Negara Hukum dan Konstitusi*. Yogyakarta, Liberty
- Fatkurohman, 2004. *Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia*. Bandung, Citra Aditya Sakti
- Fatmawati. 2005, *Hak Menguji (Toetsingrecht) yang Dimiliki Hakim dalam Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo
- Gunawan A.Tauda, 2012, *Komisi Negara Independen*, Yogyakarta, Genta Press

- H.Iriyanto A dan Baso Ence, 2008, *Negara Hukum & Hak Uji Konstitusionalitas Mahkamah Konstitusi*, Bandung. PT.Alumni
- Huda. Nikmatul, 1999, *Teori Hukum Konstitusi*, Jakarta, Rajawali Press.
- H. Mustamin D.G. Matutu, dkk, 2004, *Mandat, Delegasi, Atribusi dan mplementasinya di Indonesia*, Yogyakarta, UII Press
- Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, (New York: Russel & Russel, 1961), hlm. 157.
- I Dewa Gede Atmaja, 2010, *Hukum Konstitusi Problematika Konstitusi Indonesia Sesudah Perubahan UUD 1945*, Malang, Setara Press
- I Dewa Gede Palguna, 2013, *Pengaduan Konstitusional Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara*, Jakarta, Sinar Grafika
- Ilyas. Anshori, 2009, *Hubungan Konstitusional antara MA, KY, dan MK*, Yogyakarta, Rangkang Education.
- Indroharto, 2000, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, cet. XVII, Bandung, Citra Aditya Bakti
- Idrus Affandi, 1997, *Tata Negara (Untuk Sekolah Menengah Umum Kelas 3 Program Ilmu Pengetahuan Sosial*. Jakarta, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
- Ismail Sunny, 1962, *Pembagian Kekuasaan Negara*, cet.1, Jakarta, Departemen Penerangan RI
- Jean Jacques Rousseau, 2010, *Perihal Kontrak Sosial atau Prinsip Hukum-Politik (Du Contract Social ou Principes du Politique)*, diterjemahkan oleh Rahayu Surtiati Hidayat dan Ida Sundari Husen, Jakarta, Dian Rakyat
- Janedjri M. Gaffar, 2009, *Kedudukan, Fungsi dan Peran Mahkamah Konstitusi dalam sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Surakarta
- John P. McKay, Bennett D. Hill, dan John Buckler, 2005, *A History of Western Society: From Absolutism to the Present*, St. Martin's, Bedford
- Kansil, C.S.T. 1986. *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, Jakarta, Bina Aksara
- K.C.Wheare. 1975. *Modern Constitutions*. London-New York, Toronto. Oxford University Press. 3 Impression

Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1988, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta, UI Press

Lord Acton, 1887, *Letter to Bioshop Mandell*, Creighton

Maria Farida Indrati, 2007, *Ilmu Perundang-Undangan Jilid 1* Yogyakarta, Kanisius

Martitah, 2013, *Mahkamah Konstitusi Dari Negatif Legislature ke Positif legislature*, Jakarta, Konstitusi Press

Maruarar Siahaan, 2005, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta, Konstitusi Press

Miriam. Budiardjo, 1994, *Demokrasi di Indonesia Demokrasi Parlementer dan Demokrasi Pancasila*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama

....., 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta. Gramedia. Philipus

Moh. Mahfud. MD, 2010, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, Jakarta. Rajawali Press

Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum & Penelitian Hukum*. Bandung. PT.Citra Aditya Bakti

Muhammad Ridwan Indra, 1990, *Undang Undang Dasar 1945 Sebagai Karya Manusia*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan

Mustamin D.G. Matutu, 2004, *Mandat, Delegasi, Atribusi dan Implementasinya di Indonesai*, Yogyakarta, UI Press

Ni'matul Huda, 2005, *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*, Yogyakarta, UII Press

Robert M. MacIver, 1961, *The Web of Government*, New York, The Mac Millan Company

Romi Librayanto, *Trias Politica Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia*.

....., 2008, *Trias Politica Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, cet. I, Makasar, Pusat Studi Politik, Demokrasi, dan Perubahan Sosial

Prajudi Atmosudirjo, 2002, *Hukum Administrasi Negara*, cet. X, Jakarta, Ghalia Indonesia

Soewoto Mulyosoedarmo, 2004, *Pembaharuan Ketatanegaraan Melalui Perubahan Konstitusi*, Jawa Timur, Asosiasi Pengajar HTN & HAN dan In TRANS

Soimin dan Mashuriyanto, 2013, *MK Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Yogyakarta, UII Press

Sutiyoso Bambang, 2006, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti

Thomas Paine, 1972, *Right of Man*, Contituion Society

Tim Prima Pena, 2001, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Bandung, Gitamedia Press

Tim Pengajar Ilmu Negara, 2009, Ilmu Negara, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, UI Press

Tom Ginsburg, 2003, *Judicial Review in New Democracies: Constitutional Court in Asian Cases*, Cambridge University Press

Vicky C.Jackson, & Mark Tunsnet, 1999, *Comparative Constitutional Law*, New York, Foundation Press

Wade and Godfrey Philips, 1977, *Contitutinal and Administrive Law*, London, Long-Man

William G. Andrews, 1968, *Constitutions and Constitutionalism*, ed.3, Van Nostrand Company, New Jersey

Wijono Projodikoro, 1989. *Asas- Asas Hukum Tata Negara Di Indonesia* Jakarta, Dian rakyat

JURNAL

Alice Ristroph, *Proportionality as a Principle of Limited Government*. Duke Law Journal No. 05-19 (November 2005)

Ateng Syafrudin, 2000, *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab*, Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung

Bugaric Bojan, 2001, *Courts as Policy-Makers:essons from Transition*, dalam 42nd Harvad International Law Jurnals

Hans Kelsen, *La garantue jurisdictionnelle de la constitution (La Justice constitutionnelle) Revue du droit public de la science politique en France et a l'etranger*, (Paris: Librarie General de Droit et the Jurisprudence, 1928) hlm. 197-257.

Jeremy Waldron, 2012, *Separation of Powers or Division of Power*, University School of Law Public Law & Legal Theory Research Paper Series No. 12-20, New York

Mahkamah Konstitusi, 2008, *Judicial Review, dan Welfare State Kumpulan Pemikiran I Dewa Gede Palguna*, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi

Teguh Satya Bhakti, "Perbandingan Konsep Trias Politica Menurut John Locke, Montesquieu, dan Undang-Undang Dasar." Dalam Jurnal Tata Negara FHUI: Beberapa Teori dalam Hukum Tata Negara. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara FHUI, 2003

MAKALAH

Allan R. Brewer-Carias, "*General Report: Constitutional Courts as Positive Legislators in Comparative Law*" (makalah disampaikan dalam XVIII International Congress of Comparative Law, International Academy of Comparative Law, Washington DC, pada 26-30 Juli 2010)

Moh. Mahfud MD, Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, disampaikan pada temu wicara Ketua Mahkamah Konstitusi dengan civitas Akademika IAIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 29 Oktober 2009

KORAN

Harian Kompas, Edisi Tanggal 22 Desember 2006

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomer 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi tentang Mahkamah Konstitusi

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009 tentang Pengujian Pasal 28 dan Pasal 111 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008

GLOSSARY

Checcks and Balance Sytem

Sistem saling mengontrol dan mengimbangi, yang menempatkan semua lembaga negara dalam kedudukan setara sehingga terdapat keseimbangan dalam penyelenggaraan negara.

Hak/Kewenangan Konstitusional

Hak dan/atau kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Judicial Review

Pengujian norma hukum oleh lembaga yudikatif. *Judicial review* di Indonesia meliputi *Constitutional Review* dalam arti *Judicial review of Legislation*, yaitu pengujian Undang-Undang terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. *Judicial review of Regulation* yaitu pengujian Peraturan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang oleh Mahkamah Agung.

Materiele toetsingrech

Pengujian produk perundang-undangan yang berkenaan dengan materi muatan yang berkaitan dengan bunyi dan makna dari ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Bentuk pengujian produk perundang-undangan yang menguji procedural pembentukan disebut pengujian formil

Putusan *Positive Legislature*

Putusan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian Undang-Undang yang dalam putusannya mengatur. Putusan Mahkamah Konstitusi yang dalam putusannya mengatuiur bias terdapat pada putusan *conditionally constitutional* maupun *conditionally unconstitutional*

INDEKS

C		Kewenangan Iv, 3, 5, 8, 13, 26, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 45, 50, 52, 56, 58, 61, 62, 64, 66, 67, 70, 71, 74, 75, 76, 77, 82
Check And Balances	32, 34, 75	Konstitusi Iv, Viii, Ix, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 18, 19, 21, 22, 33, 39, 45, 46, 54, 56, 59, 67, 68, 69, 70, 72, 78, 79, 80, 81, 82
Civil Law	1, 16, 40	L
Common Law	16, 17, 40	Legislatif Iv, 2, 3, 5, 6, 8, 21, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 38, 39, 43, 44, 46, 51, 52, 53, 55, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 75, 76
Constitutional Court	V, 43, 56, 61, 81	M
Constitutional State	24, 63	MK Iv, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 31, 34, 38, 40, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 81
D		MPR Iv, V, 2, 57, 76
Demokrasi	21, 26, 43, 54, 57, 64	N
Doktrin	16, 27, 30	Negara 1, 2, 3, 4, 10, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 48, 50, 54, 56, 57, 58, 62, 63, 67, 68, 70, 72, 73, 75, 82
DPR Iv, V, 2, 5, 8, 52, 53, 56, 57, 60, 73, 76, 77		Negara Hukum 1, 16, 17, 18, 19, 25, 67, 69
E		Negatif Legislature 59, 80
Eksekutif 2, 8, 21, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 55, 75		Norma Iv, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 39, 41, 42, 51, 52, 56, 58, 60, 61, 62, 68, 71, 73, 75, 76, 77, 82
F		P
Final And Binding Iv, 5, 8, 9, 47, 72, 76		Pembagian Kekuasaan 2, 17, 24, 27, 31, 32, 44, 54, 55
H		Pembatal Norma 8, 52, 75, 76
Hukum I, Ii, Vi, Vii, Viii, 1, 4, 5, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 40, 44, 45, 46, 54, 56, 62, 67, 69, 72, 78, 79, 80, 81, 82		Pengujian 42, 48, 49, 58, 82
I		Positive Legislature V, Ix, 51, 54, 67, 82
Inkonstitusional 36		Putusan Iv, 5, 6, 8, 9, 13, 14, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 58, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 82
J		R
Judicial Review 4, 5, 6, 8, 10, 40, 41, 42, 56, 58, 64, 66, 70, 71		Republik 1, 6, 11, 15, 29, 31, 39, 45, 46, 48, 56, 70, 78, 79, 80, 81, 82
Judicial Review V, 3, 17, 41, 43, 44, 45, 80, 81, 82		
K		
Keadilan 46, 73		
Kekuasaan Iv, 1, 2, 3, 7, 8, 9, 13, 17, 18, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 42, 43, 44, 45, 46, 52, 54, 55, 56, 57, 61, 64, 65, 66, 68, 71, 73, 75, 76		

S

Separation Of Power	27, 30
Supremacy Of Law	17, 19, 27, 54, 55, 67
Supremasi Hukum	17

T

The Rule Of Law	18, 23, 68
Traktat	16

U

Undang Undang Dasar	Iv, 1, 11, 19, 20, 80, 82
Undang-Undang	16, 30, 48, 49, 52, 59, 70, 82

W

Wewenang	Iv, 6, 8, 9, 10, 13, 27, 35, 36, 37, 44, 46, 63, 64, 67, 69, 71, 75, 76
----------	--

Y

Yudikatif	Iv, 2, 8, 10, 21, 27, 28, 30, 31, 32, 34, 45, 46, 51, 52, 55, 62, 64, 82
Yurisprudensi	16

